

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	3
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :	Radar Sampit <input checked="" type="checkbox"/>	Halaman :	12
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post		Tabungan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

BPK Temukan Rp2,5 Miliar Belum Dibayarkan

KASONGAN- Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan merespon, tereksposnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng, atas tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) setempat tahun 2022 yang belum dibayarkan, senilai Rp2,5 Miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Ferisso menjelaskan, yang menjadi catatan dan temuan dari BPK RI Perwakilan Kalteng itu, yakni atas pembayaran tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Ia menegaskan, dananya bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan. Melainkan berasal dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik pemerintah pusat.

"Sebelumnya, kami sendiri yang menyampaikan langsung kepada pihak BPKRI Perwakilan Kalteng. Sehingga, menjadi catatan dan perbaikan. Iya kita patut bersyukur Kabupaten Katingan tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujarnya, Sabtu (29/7).

Lebih lanjut Ferisso menjelaskan, pada tahun anggaran 2022, pemerintah pusat mentransfer tunjangan khusus guru PNSD untuk 378 orang guru di Katingan, dengan nilai mencapai Rp 11 Miliar. Padahal menurutnya, kebutuhan alokasi untuk satu tahun atau 12 bulan dari jumlah penerima tunjangan tersebut, mencapai Rp 13 Miliar lebih.

"Tunjangan yang disalurkan senilai Rp11 Miliar itu hanya cukup untuk 10 bulan. Sehingga, ada dua bulan yang belum tersalurkan kepada guru yang menjadi penerima, dengan total nominal sekitar Rp 2,5 Miliar," terangnya.

Ferisso juga menyebutkan, karena dua bulan yang belum terbayarkan itulah yang menjadi temuan dari badan



FERISSO

pemeriksa keuangan. Selanjutnya, saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat melalui surat Bupati Katingan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Memang saat ini belum ada jawaban secara tertulis dari kementerian. Namun, kami tetap menunggu petunjuk selanjutnya dari pemerintah pusat," tegasnya.

Mantan Kepala Dinas Dukcapil Katingan ini mengungkapkan juga, keterlambatan pembayaran tunjangan ini sangat dikeluhkan para guru PNS setempat. Namun, dirinya sudah menjelaskan kepada guru untuk bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang kurang baik.

"Apalagi sampai membuat tanggapan yang kurang elok di media sosial atas tunjangan yang belum dibayarkan tersebut. Sebab, ini demi kebaikan kita bersama," cetus Ferisso.

Di lain pihak, ia merespon positif jika Fraksi Partai Golkar di DPRD Katingan yang turut menyoroti temuan BPK RI tersebut. Sebab menurutnya, hal itu menjadi tugas dari pihak legislatif yang melakukan fungsi pengawasan. Namun, diakuinya sampai saat ini pihak Dinas Pendidikan belum diundang dan dimintai pendapat dari DPRD setempat, terkait persoalan tersebut. (sos/gus)